

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
MALUKU UTARA 2016

PROTAGONIS ESKALASI DEMOKRASI
MALUKU UTARA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA

**INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
MALUKU UTARA 2016**

**PROTAGONIS ESKALASI DEMOKRASI
MALUKU UTARA**



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA MALUKU UTARA 2016 PROTAGONIS ESKALASI DEMOKRASI MALUKU UTARA

(Booklet)

Katalog BPS	: 4601011.82
No. Publikasi	: 82520.1805
Ukuran Buku	: 21 cm x 14,8 cm
Jumlah Halaman	: iii + 23 halaman
Naskah	: Seksi Statistik Ketahanan Sosial
Penyunting	: Bidang Statistik Sosial
Gambar Kulit	: Bidang Statistik Sosial
Dicetak Oleh	: BPS Provinsi Maluku Utara
Diterbitkan Oleh	: © BPS Provinsi Maluku Utara
Tahun	: 2018

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terbentuk dari tiga Aspek utama yaitu Aspek Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Aspek Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Aspek Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*), dengan sebelas variabel dan 28 indikator. BPS Provinsi Maluku Utara mempublikasikan perkembangan setiap aspek, variabel, dan indikator IDI Maluku Utara tahun 2015 dalam sebuah booklet dengan judul Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku Utara 2016, Protagonis Eskalasi Demokrasi Maluku Utara.

Pada IDI 2016 meneruskan penggunaan dua indikator baru seperti pada IDI 2015 yaitu indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” sebelumnya adalah “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif”. Kemudian indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” sebelumnya adalah “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.

Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, baik untuk bahan perencanaan, monitoring maupun bahan evaluasi program pembangunan yang dilaksanakan khususnya pembangunan demokrasi di Maluku Utara.

Disadari sepenuhnya bahwa penyajian Booklet ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan booklet di masa yang akan datang. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan booklet ini, disampaikan terima kasih.

Ternate, April 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara



Drs. Misfaruddin, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
Apakah IDI?.....	1
Mengapa IDI Diperlukan?	2
Apakah Manfaat IDI?.....	3
Aspek, Variabel dan Indikator IDI.....	4
Metodologi IDI.....	6
Wajah Demokrasi Maluku Utara.....	7
Potret Kebebasan Sipil di Maluku Utara.....	11
Sudahkah Hak-hak Politik Masyarakat Terpenuhi?.....	13
Peran Lembaga Demokrasi terhadap Demokrasi di Maluku Utara.....	15
Lampiran.....	17



APAKAH IDI ?

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur empirik dan obyektif terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di tanah air. IDI dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik Indonesia. Kegiatan penyusunan IDI dilaksanakan sejak tahun 2009 yang dinahkodai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), didukung oleh Kementerian

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemnkopolhukam), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pemerintah provinsi. Dalam prosesnya melibatkan organisasi masyarakat sipil dan akademisi dari seluruh Indonesia.

Dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya, IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia. Secara makro, kekhasan yang dimaksud yaitu terkait dengan realitas demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika pergeseran relasi antara negara dan masyarakat pada periode pasca-Soeharto (periode reformasi).

IDI diharapkan dapat menjadi rujukan, baik dalam melakukan kajian-kajian akademis maupun dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan politik.



MENGAPA PERLU IDI?

Setelah berakhirnya Orde Baru, terbuka kesempatan bagi Bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi penyelenggaraan Negara. Demokrasi menjadi pilihan karena merupakan bentuk pemerintahan atau sistem politik yang tepat untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter. Masyarakat kian peka terhadap praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tidak benar dan dianggap merugikan rakyat.

Dalam upaya menyikapi perkembangan politik inilah yang kemudian mengharuskan pemerintah untuk dapat bersikap lebih tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Dalam masa transisi demokrasi yang besar ini, tentunya pemerintah baik di level nasional maupun daerah sangat perlu untuk mengetahui sejauh mana demokrasi berkembang dan telah diterapkan di seluruh wilayah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

Untuk itulah IDI lahir sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pemerintah terhadap data yang dapat memberikan gambaran secara utuh terhadap kondisi demokrasi di tanah air.



APAKAH MANFAAT IDI?

1

Secara akademis, IDI dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di tingkat provinsi di seluruh wilayah Indonesia. IDI memberikan data penting dengan tolak ukur jelas bagi keperluan studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia.

2

IDI bermanfaat bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi. Data-data yang ditunjukkan IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang.

3

Secara keseluruhan, IDI bermanfaat dalam evaluasi pelaksanaan demokrasi di daerah. Pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk menindaklanjuti hasil IDI.



ASPEK, VARIABEL, & INDIKATOR IDI

3 Aspek, 11 Variabel, dan 28 Indikator IDI

A. KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)

I. Kebebasan berkumpul dan berserikat
1 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
2 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
II. Kebebasan berpendapat
3 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
4 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
III. Kebebasan berkeyakinan
5 Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya
6 Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya
7 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama
IV. Kebebasan dari diskriminasi
8 Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
9 Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
10 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

3 Aspek, 11 Variabel, dan 28 Indikator IDI

B. HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS)

- V. Hak memilih dan dipilih
 - 11 Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat
 - 12 Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih
 - 13 Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)
 - 14 Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)
 - 15 Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD
- VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
 - 16 Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
 - 17 Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

C. LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS)

- VII. Pemilu yang bebas dan adil
 - 18 Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
 - 19 Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara
- VIII. Peran DPRD
 - 20 Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
 - 21 Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan
 - 22 Rekomendasi DPRD kepada eksekutif
- IX. Peran Partai politik
 - 23 Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
 - 24 Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi
- X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
 - 25 Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh Keputusan PTUN
 - 26 Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
- XI. Peran Peradilan yang independen
 - 27 Keputusan hakim yang kontroversial
 - 28 Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi



METODOLOGI IDI

Telaah Surat Kabar dan Dokumen

Media dan dokumen dianggap sebagai sumber informasi paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif berkaitan dengan IDI. Media yang digunakan adalah surat kabar (koran), sedangkan dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, seperti Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan Bupati/Walikota, data Pemilu Legislatif dari KPUD serta dokumen-dokumen resmi lainnya.

Focus Group Discussion (FGD)

FGD memiliki peranan penting dalam upaya untuk meminimalkan “bias” dari informasi yang dijangkau melalui telaah media dan dokumen. Melalui FGD, didapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan berupa verifikasi, konfirmasi dan diskonfirmasi atas data-data kuantitatif yang telah dikumpulkan melalui telaah surat kabar dan dokumen. Selain itu FGD juga berfungsi untuk menggali data-data yang mungkin luput diberitakan surat kabar.

Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam bersifat komplementer karena melengkapi telaah surat kabar dan dokumen serta FGD. Wawancara mendalam digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh dari telaah surat kabar, dokumen dan FGD. Narasumber dapat berasal dari FGD yang aktif memberikan masukan dan klarifikasi terhadap berita maupun kasus-kasus yang ditemukan baik dalam telaah media maupun dokumen.



WAJAH RASI MALUKU UTARA

Perkembangan IDI

IDI Provinsi Maluku Utara tahun 2016 adalah 73,27 atau naik 11,75 poin dibandingkan IDI 2014 sebesar 61,52. Kenaikan yang cukup signifikan ini membuat posisi IDI Maluku Utara berada pada kategori sedang.

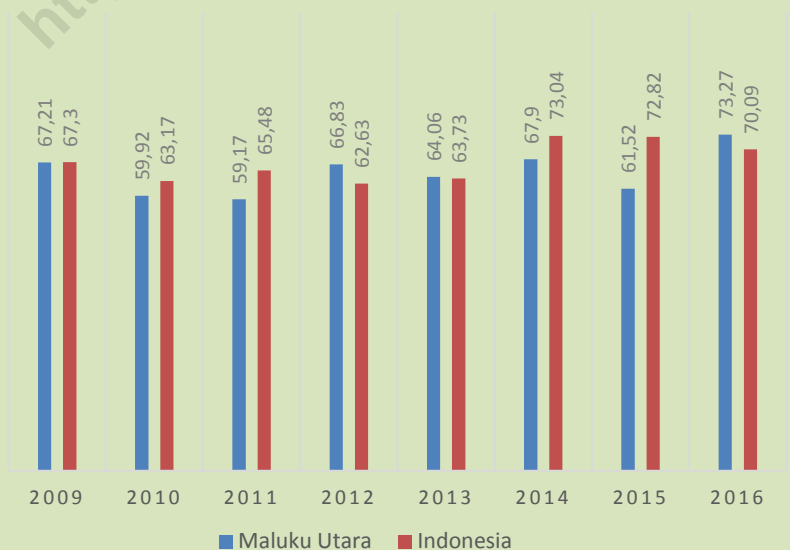
Perkembangan IDI Provinsi Maluku Utara dari tahun 2009 hingga tahun 2015 berfluktuasi (Grafik 1). Pada tahun 2010 dan 2011 Maluku Utara termasuk kategori buruk kemudian beranjak menjadi kategori sedang hingga saat ini.

Pada grafik 2 dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan IDI Indonesia (nasional) 2016 yang sebesar 70,09, capaian IDI Maluku Utara lebih tinggi 3,18 poin. Dari grafik tersebut dapat juga diketahui bahwa untuk kali kedua setelah tahun 2013 nilai IDI Maluku Utara tahun 2016 mencatat pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan nilai IDI Indonesia.

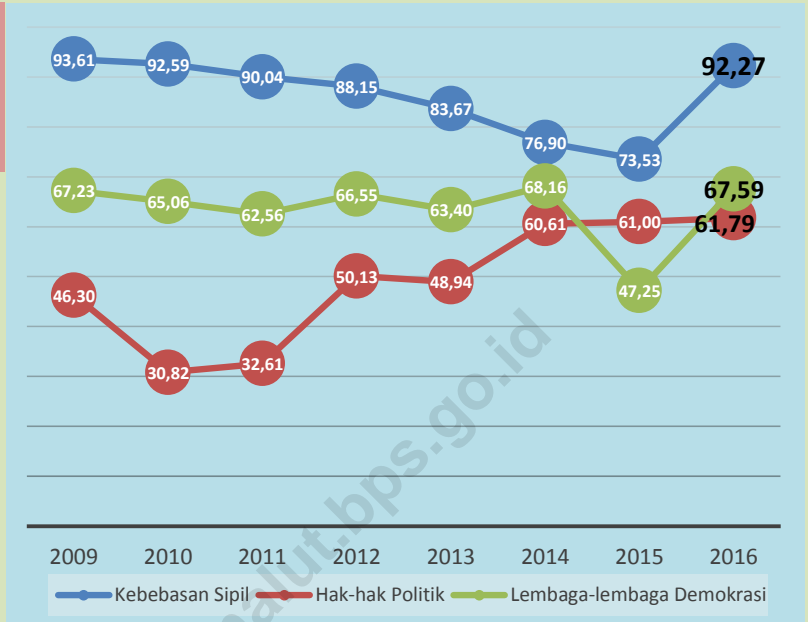
Grafik 1.
Perkembangan
IDI Maluku
Utara, 2009-2016



Grafik 2.
Perkembangan
IDI Maluku
Utara dan
Indonesia,



Grafik 3.
Perkembangan
Indeks Aspek IDI
Maluku Utara,
2009-2015



Angka IDI merupakan indeks komposit yang disusun dari tiga aspek, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi. Pada tahun 2016 capaian komponen IDI Maluku Utara ialah sebagai berikut: aspek kebebasan sipil 92,27; aspek hak-hak politik 61,79; dan aspek lembaga-lembaga demokrasi 67,59.

Selama delapan tahun pengukuran IDI (2009-2015), terdapat satu aspek IDI yang memiliki tren turun sedangkan dua aspek lainnya cenderung bergerak fluktuatif. Aspek IDI yang memiliki tren turun dalam kurun waktu delapan tahun tersebut ialah aspek kebebasan sipil. Sementara itu aspek Hak-hak politik dan aspek lembaga-lembaga demokrasi cenderung berfluktuatif pada periode yang sama.

Pada tahun 2016, dinamika IDI Maluku Utara mengalami eskalasi pada seluruh nilai aspek-aspeknya. Aspek kebebasan sipil berhasil keluar dari tren menurun hingga mencatatkan kenaikan 18,74 poin menjadi 92,27 dibandingkan nilai aspek tersebut pada tahun 2015 sebesar 73,53.

Aspek hak-hak politik turut mengalami peningkatan 0,79 poin menjadi 61,79 dibandingkan tahun 2015 sebesar 61,00. Demikian halnya dengan aspek lembaga-lembaga demokrasi yang mengalami peningkatan 20,34 poin menjadi 67,59 dibandingkan tahun 2015 sebesar 47,25

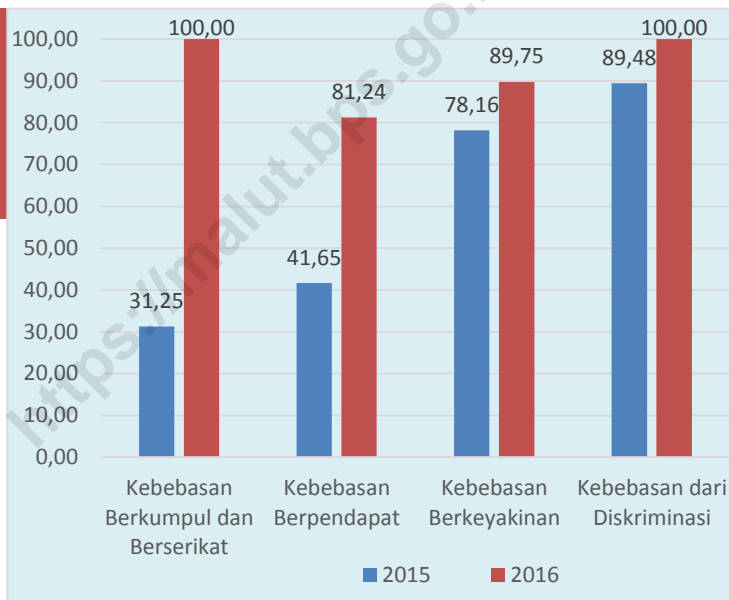
Menurut kategori, aspek kebebasan sipil bergeser dari kategori “sedang” menjadi kategori “baik” pada tahun 2016. Hal ini merupakan implikasi dari meningkatnya nilai aspek kebebasan sipil menjadi lebih besar dari ambang batas bawah kategori “baik” yaitu, 80,00. Pergeseran juga terjadi pada aspek lembaga-lembaga demokrasi yang pada tahun 2015 lalu berkategori “buruk” kini telah berkategori “sedang” pada tahun 2016. Sementara itu, aspek hak-hak politik tidak mengalami perubahan kategori, dimana masih pada kategori “sedang” seperti keadaan tahun 2015.

Secara umum peningkatan nilai pada masing-masing aspek dipengaruhi oleh capaian nilai variabel-variabel dibawahnya. Sepanjang tahun amatan 2016, sebagian besar variabel dari aspek-aspek IDI di Maluku Utara mengalami peningkatan yang beragam.



OTRET KEBEBASAN SIPIL DI MALUKU UTARA

Grafik 4.
Indeks Variabel
Kebebasan Sipil
IDI Maluku Utara
Tahun 2015 dan
2016



Aspek kebebasan sipil Maluku Utara pada 2016 meningkat signifikan disebabkan oleh peningkatana pada empat variabel di dalamnya. Keempat variabel yang termasuk dalam aspek kebebasan sipil yaitu variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, variabel kebebasan berpendapat, variabel kebebasan berkeyakinan, dan variabel kebebasan dari diskriminasi.

Pada grafik 4, dapat dilihat bahwa nilai Variabel kebebasan berkumpul dan berserikat pada tahun 2016 adalah sebesar 100,00. Nilai variabel tersebut mengalami peningkatan sebesar 68,75 poin dibandingkan nilai variabel pada tahun 2015 sebesar 31,25. Peningkatan nilai variabel kebebasan berkumpul dan berserikat hingga mencapai nilai 100,00 disebabkan oleh tidak ditemukannya indikasi penyimpangan pada variabel tersebut pada surat kabar sepanjang tahun 2016 ataupun melalui *Focus Group Discussion* (FGD) IDI.

Selanjutnya variabel kebebasan berpendapat pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 81,24 atau meningkat 39,59 poin dibandingkan tahun 2015. Kemudian peningkatan pun terjadi pada nilai variabel kebebasan berkeyakinan pada tahun 2016 mencapai 89,75 atau meningkat 11,59.

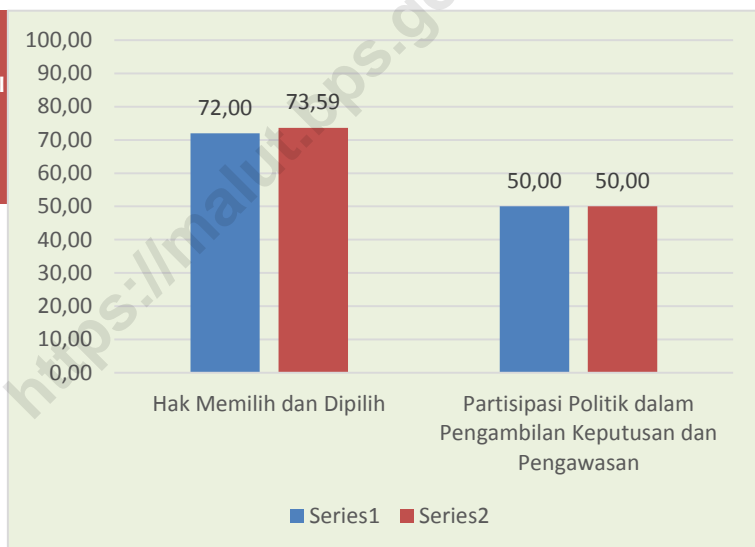
Variabel kebebasan dari diskriminasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 100,00 atau meningkat 10,52 poin dibandingkan tahun 2015. Seperti halnya capaian nilai variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, nilai variabel kebebasan dari diskriminasi sebesar 100,00 disebabkan oleh tidak ditemukannya berita terkait pada surat kabar maupun forum FGD.

Empat variabel pada aspek kebebasan sipil secara bersama-sama menjadi protagonis eskalasi nilai aspek kebebasan sipil. Capaian indeks tersebut menggambarkan bahwa kondisi kebebasan sipil di Maluku Utara pada tahun 2016 dapat dikatakan baik.



HAK-HAK POLITIK SYARAKAT MALUKU UTARA

Grafik 5.
Indeks Variabel
Hak-hak Politik IDI
Maluku Utara
Tahun 2015 dan
2016



Peningkatan pada aspek hak-hak politik disebabkan oleh peningkatan pada salah satu variabel, yaitu variabel Hak memilih dan dipilih. Sementara itu variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan memiliki nilai yang sama seperti tahun 2015.

Variabel hak memilih dan dipilih mengalami peningkatan 1,59 poin menjadi 73,59 pada tahun 2016 dibandingkan nilai variabel tersebut pada tahun 2015 sebesar 72,00. Kenaikan tersebut dipicu oleh penambahan jumlah anggota DPRD Provinsi Maluku Utara wanita pada proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota dewan.

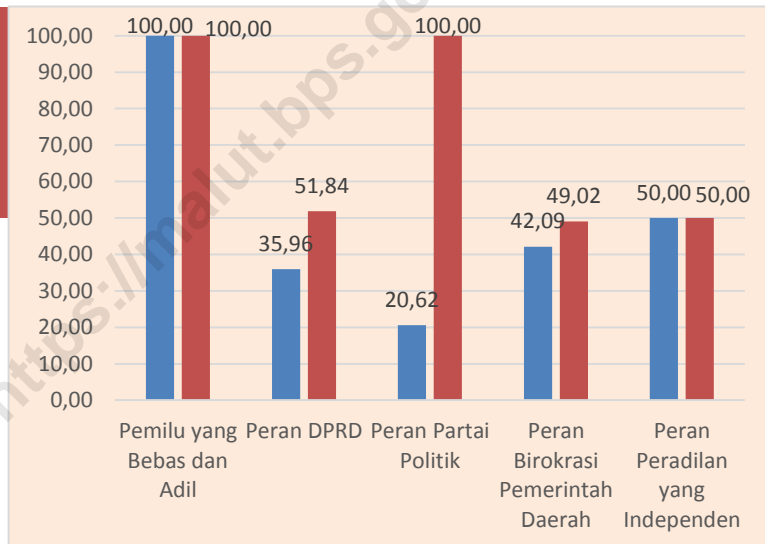
Nilai indeks variabel hak memilih dan dipilih sangat bergantung kepada penyelenggaraan pemilihan umum. Empat dari lima indikator merupakan perilaku pada waktu pelaksanaan pemilu legislatif. Sebaliknya variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dapat diamati setiap tahun meskipun skor dua indikator tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2015.

Kemudian variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yaitu 50,00 pada tahun 2016 atau memiliki nilai yang sama dengan kondisi pada tahun 2015. Pada satu sisi masyarakat terpantau aktif dalam memberikan masukan/pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan di sisi lainnya masyarakat pun masih sering terlibat dalam unjuk rasa yang bersifat mogok bahkan berujung aksi kekerasan dan penyegelan beberapa kantor pemerintahan. Kedua kejadian terjadi merupakan wujud dari indikator-indikator yang berkontribusi pada capaian nilai variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.



LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI SEBAGAI PROTAGONIS UTAMA

Grafik 6.
Indeks Variabel
Lembaga
Demokrasi IDI
Maluku Utara
Tahun 2015 dan
2016



Aspek lembaga-lembaga demokrasi mengalami peningkatan nilai yang cukup signifikan hingga 20,34 poin dari 47,25 pada tahun 2015 menjadi 67,59 pada tahun 2016. Peningkatan nilai aspek tersebut disebabkan oleh peningkatan pada dua variabel yang ada di dalamnya.

Variabel peran DPRD meningkat 15,88 poin menjadi 51,84 pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sebesar 35,96. Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan provinsi Maluku Utara.

Pada tahun 2016 variabel peran partai politik meningkat signifikan 79,38 menjadi 100,00 dibandingkan tahun 2015 sebesar 20,62. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh partai-partai politik di Maluku Utara sepanjang tahun 2016. Selain itu, partisipasi perempuan dalam kepemimpinan partai politik di tingkat dewan penguruh daerah provinsi cukup tinggi.

Selanjutnya variabel peran birokrasi pemerintah daerah meningkat 6,93 poin menjadi 49,02 pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sebesar 42,09. Hal ini disebabkan oleh peningkatan peran pemerintah dalam melakukan birokrasi yang efektif dalam pembuatan berbagai kebijakan.

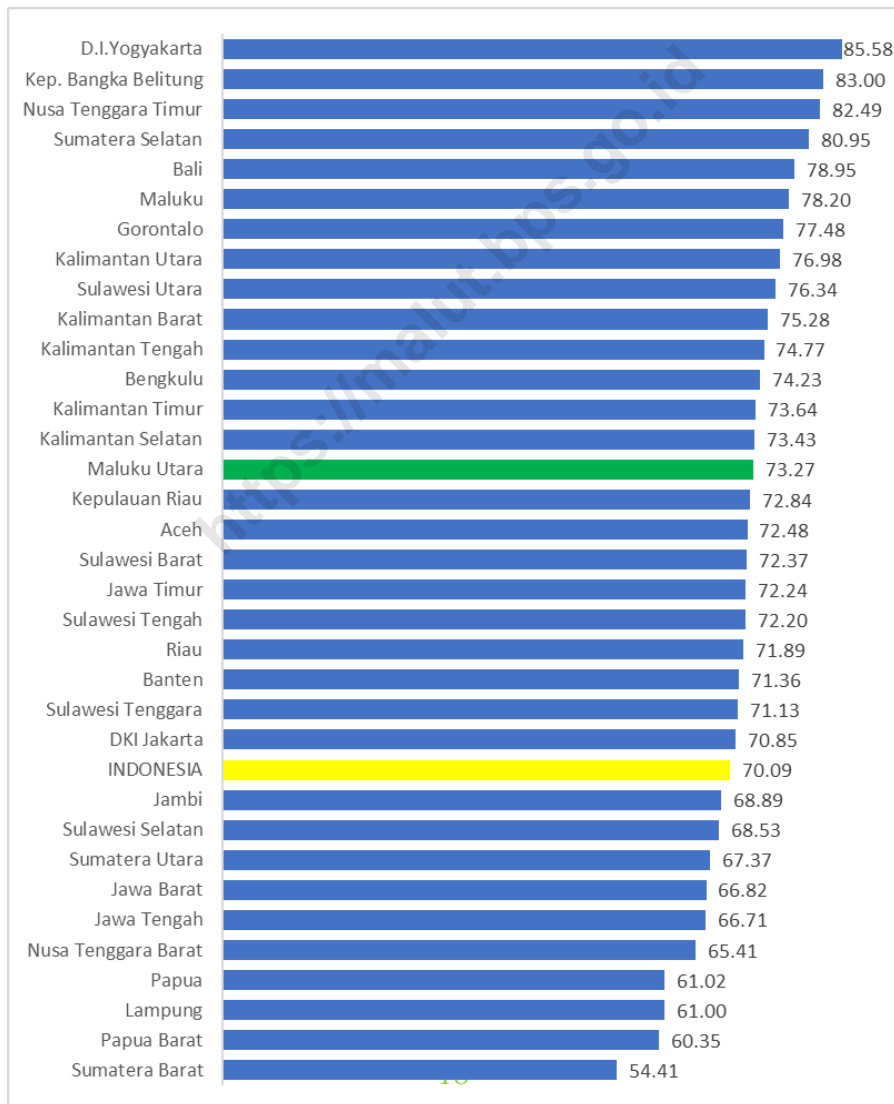
Variabel pemilu yang bebas dan adil serta variabel peran peradilan yang independen memiliki nilai yang sama seperti tahun 2015. Nilai variabel pemilu yang bebas dan adil pada tahun 2016 yaitu 100,00 dan nilai ini berdasarkan penyelenggaraan pemilu legislatif lima tahunan.

Selanjutnya variabel peran peradilan yang independen, selama tahun 2016 tidak ditemukan keputusan hakim yang dianggap kontroversial. Namun, terdapat satu penghentian penyidikan yang dianggap kontroversi oleh masyarakat sehingga menyebabkan capaian nilai variabel ini tidak meningkat.

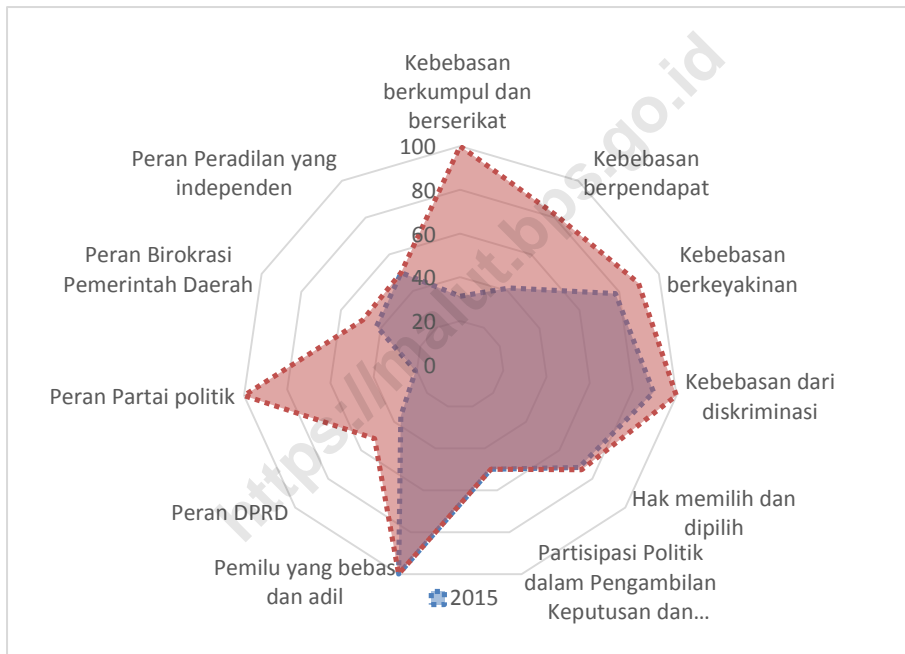


LAMPIRAN

Lampiran 1
 Capaian Kinerja Demokrasi Maluku Utara di Tingkat Nasional
 Tahun 2016



Lampiran 2
Perkembangan Variabel IDI Provinsi Maluku Utara
Tahun 2015 dan 2016

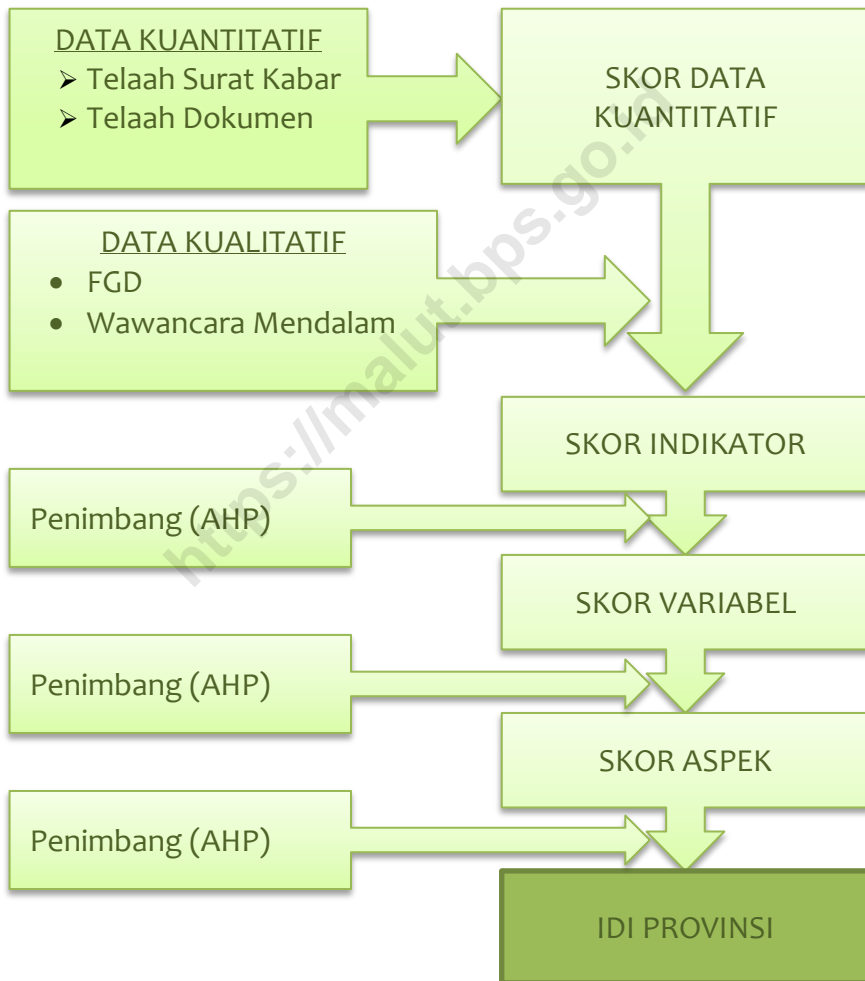


Lampiran 3
 Nilai Indikator IDI Maluku Utara Tahun 2015 dan 2016

Nomor Indikator	Nama Indikator	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	25,00	100,00
2	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	75,00	100,00
3	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	50,00	87,50
4	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	50,00
5	Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	82,61	91,30
6	Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	62,50	87,50
7	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	70,00	85,00
8	Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
9	Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	62,50	100,00
10	Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00
11	Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	100,00	100,00
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	60,00	60,00
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	68,29	68,29
14	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih	79,27	79,27

Nomor Indikator	Nama Indikator	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
	dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)		
15	Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota	37,04	54,26
16	Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	0,00	0,00
17	Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00
18	Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00
19	Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	100,00	100,00
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	53,57	57,08
21	Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	0,00	100,00
22	Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif	3,57	0,00
23	Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	14,29	0,00
24	Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	77,68	100,00
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh Keputusan PTUN	92,11	100,00
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	0,00	97,37
27	Jumlah keputusan hakim yang kontroversial	100,00	8,33
28	Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	0,00	100,00

Lampiran 4
Proses Penghitungan IDI



Lampiran 5
Instansi Peserta FGD IDI Maluku Utara 2016

No.	Nama Instansi
1.	Kepolisian Daerah Maluku Utara
2.	Bappeda Provinsi Maluku Utara
3.	Badan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara
4.	Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara
5.	Ombudsman RI Maluku Utara
6.	DP3A Provinsi Maluku Utara
7.	Pengadilan Tinggi Maluku Utara
8.	Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
9.	Diskominfo Provinsi Maluku Utara
10.	Kesultanan Ternate
11.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
12.	Partai Golkar
13.	DPD KNPI Provinsi Maluku Utara
14.	PW KAMMI Provinsi Maluku Utara
15.	LSM Daurmala
16.	PUSPA Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
17.	Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
18.	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Utara
19.	FKUB Provinsi Maluku Utara
20.	Gereja GPELI Ternate
21.	Gereja GPM Ternate
22.	Malut Post
23.	Posko Malut

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU UTARA

Jl. Stadion No. 45, Ternate—97712

Telp. (0921) 3127878 Fax. (0921) 3126301

Homepage: <http://malut.bps.go.id> Email: malut@bps.go.id